

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA PERUSAHAAN NEGARA DAN PERUSAHAAN SWASTA PADA PT. PIPA MAS PUTIH

Abstrak

PT. Pipa Mas Putih merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri pengadaan barang dimana PT. Pipa Mas Putih menyediakan Pipa-Pipa berteknologi Tinggi untuk menunjang industri-industri besar perusahaan perminyakan Kontraktor Production Sharing Minyak dan Gas (KPS Migas) maupun perusahaan industri lainnya. Penulis ingin mengetahui bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang membedakan antara perusahaan yang merupakan perusahaan Negara dengan perusahaan Swasta. Serta bagaimana aspek Pajak Pertambahan Nilai dan terkait dengan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutama pada setiap transaksi yang mengandung PPN. Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat untuk perusahaan dalam melakukan evaluasi perhitungan dan pelaporan PPN, Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN serta cara menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya. Hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan antara perusahaan yang dimiliki oleh negara atau yang berstatuskan pemungut dengan perusahaan yang dimiliki swasta yang berstatuskan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hasil temuan adanya Faktur Pajak Keluaran yang dikategorikan sebagai Faktur Pajak cacat karna identitas pembeli yang tidak lengkap. Selain itu analisa pencatatan dan perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang ada di perusahaan. Diketahui bahwa perusahaan sering terjadi telat setor dan telat lapor, dimana perusahaan masih belum mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. terdapat pula permasalahan dalam Fasilitas Pajak yakni ketidak lengkapan dari dokumen terkait dengan penyerahan di Pulau Batam baik penyerahan untuk dalam maupun luar negeri. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Pipa Mas Putih memiliki beberapa kendala dalam pemenuhan atas kewajiban perpajakannya. Baik dari pembuatan Faktur Pajak, Penyetoran dan Pelaporan yang mana hal tersebut memiliki dampak negatif dalam aspek perpajakannya. Saran penulis adalah melakukan optimalisasi terhadap aspek aspek tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan ulang dan mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dan memperbaru informasi tentang perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pemungut, Kewajiban PKP(Pengusaha Kena Pajak) dalam PPN (Pajak Pertambahan Nilai).